

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 1

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	Info Publik

Wilayah: Kabupaten Demak

Money MCP, Bupati Demak Terima 50 Sertifikat

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/564177/money-mcp-bupati-demak-terima-50-sertifikat?video=>

Demak InfoPublik - Bupati Demak Eisti'anah menerima 50 sertifikat tanah aset milik pemerintah kabupaten demak dan 4 prasarana sarana umum yang kembali di serahkan kepada pemkab demak.

Penyerahan dilakukan saat rapat koordinasi monitoring dan evaluasi MCP dan tematik di gradika bhakti praja. Selasa, (14/9/2021).

MCP merupakan aplikasi monitoring center for prevention yang digunakan sebagai tools dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi atas progres rencana aksi pemberantasan korupsi yang terintegrasi.

Penyerahan sertifikat dilakukan oleh kepala ATR/BPR Bambang Irjanto kepada bupati Eisti'anah di dampingi wakil bupati Ali Makshun, Sekda Singgih Setyono dan kepala Inspektorat Kurniawan Efendi.

Dalam sambutannya bupati menyampaikan, kabupaten Demak selama 5 tahun berturut-turut menerima opini WTP (wajar tanpa pengecualian).

Adapun hasil verifikasi per tanggal 12 september 2021 capaian MCP di demak sebesar 66 persen sehingga menjadikan kabupaten demak, berada di posisi 3 tingkat jawa tengah, dan posisi 11 tingkat nasional.

"Namun demikian tahun 2021 ini capaian MCP kabupaten demak harus lebih dari 90 persen. Dan harus menjadi perhatian kita bersama yang merupakan tugas seluruh perangkat daerah." Tambah bupati.

"Untuk itu saya minta kepada seluruh kepala OPD terutama yang menangani 8 area intervensi MCP untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dan saran dari KPK. Siapkan semua data dukung yang di butuhkan, memperhatikan indikator dan sub indikator jangan sampai ada yang terlewat sehingga kita bisa meraih nilai yang maksimal. " kata bupati.

Sebagai informasi ada 8 area intervensi dalam kegiatan koordinasi supervisi dan pencegahan (korsubgah) yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP.

Termasuk di dalamnya manajemen ASN, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah. (Kominfo/Rd/Put/toeb).